



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/Tanggal	: Senin, 13 Juli 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi listrik, BBM, gas.
Ketua Rapat	: I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E.,M.M.
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E.,M.Si
Hadir Pimpinan	: 3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI
Hadir Anggota	: 3 dari 6 Anggota BAKN DPR RI
Hadir Tamu	: Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Bpk. I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE.,MM. dan dibuka pada pukul 13.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada hari ini adalah dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi listrik, BBM dan gas.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia untuk menyampaikan masukannya terkait dengan subsidi energi.
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pimpinan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara BAKN dengan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia terkait masukan tentang kebijakan pengelolaan subsidi energi, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan dan masukan sebagai berikut :

1. Ketimpangan penyaluran subsidi energi masih terjadi di Indonesia. Pemberian volume subsidi energi, baik energi BBM, listrik, dan gas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa besarnya volume pemberian subsidi energi tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan masih terdapat pemborosan dan pemberian subsidi energi yang tidak tepat sasaran.
2. Usulan terhadap subsidi energi bahwa Hipmikindo mengharapkan adanya fasilitas dalam aspek legalitas, penyediaan barang meliputi subsidi listrik, BBM dan gas yang tersedia di pasar serta pembebanan tarif yang rendah sehingga tidak semakin membebankan UMKM khususnya di saat pandemi.
3. Saat ini UMKM mengalami kesulitan keuangan khususnya di saat pandemi Covid dalam menjalankan usahanya karena masalah permodalan dana yang minim serta penagihan dari lembaga pembiayaan dengan jangka waktu ketat. Hal ini semakin mempersulit pengusaha UMKM karena hampir 60% pengusaha UMKM tidak memiliki tabungan melainkan memiliki utang yang cukup besar dalam menjalankan usahanya.
4. Diperlukan adanya reformulasi regulasi dan kebijakan subsidi energi, mulai dari besaran volume subsidi energi dan sasaran subsidi energi. Subsidi energi yang harusnya dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, pada kenyataannya lebih banyak diterima oleh masyarakat yang berpenghasilan di atas rata-rata. Menurut 66% anggota Hipmikindo kebijakan pemberian subsidi energi masih tidak tepat sasaran.
5. Model subsidi yang diinginkan oleh Hipmikindo adalah pemberian subsidi tepat sasaran dan kebijakan yang memihak kepada yang membutuhkan. Model subsidi energi saat ini dianggap kurang efisien dan tidak tepat sasaran.
6. Harmonisasi antara kebijakan pemberian subsidi energi dan penerima subsidi energi, khususnya gas saat ini menggunakan model subsidi energi terbuka sehingga siapa saja bisa menerima subsidi energi. Pihak Hipmikindo mengharapkan pemberian subsidi energi dengan model tertutup sehingga diharapkan pihak yang menerima subsidi lebih tepat sasaran.
7. Hipmikindo mengharapkan adanya peluang atau ruang seluasnya dari pemerintah untuk UMKM khususnya di saat pandemi agar bisa *reborn*/bangkit setelah situasi pandemi Covid apapun bentuk subsidi energi yang diberikan.

8. Pelunya pengawasan terkait penyaluran pemberian subsidi energi sehingga subsidi yang diberikan menjadi tepat sasaran dan efisien.

Pihak Hipmikindo akan memberikan bahan tambahan secara tertulis kepada BAKN DPR RI terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi khususnya kepada UMKM dan pengusaha kecil.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

Jakarta, 13 Juli 2020

KETUA RAPAT,



I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE., M.M.

A-234